

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2018**



**Inspektorat Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Nipah No. 51 Padang  
Telp. (0751) 31961, 39263, Fax. (0751) 31841**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai entitas dan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD yang dikelola dengan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2018.

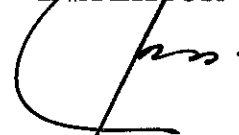
Laporan Keuangan ini telah disajikan secara transparan dan akuntabel berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan ini disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Daerah.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Padang, Januari 2019

**INSPEKTUR**



**Drs. H. MARDI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601211 198203 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	vi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	vii
II. LAPORAN OPERASIONAL .....	viii
III. NERACA .....	ix
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	x
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	1
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Informasi Umum .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	5
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD .....	7
2.1 Ekonomi Makro .....	7
2.2 Kebijakan Keuangan .....	8
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	8
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	14
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	14
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan .....	19
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	21
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	21
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	22
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	23
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah .....	25
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	27
5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....	27
5.1.1 Pendapatan LRA .....	27
5.1.2 Belanja .....	27

5.2 Penjelasan Neraca.....	32
5.2.1 Aset.....	32
5.2.2 Kewajiban.....	42
5.2.3 Ekuitas Dana.....	42
5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO).....	43
5.4.1. Pendapatan LO.....	43
5.4.2. Beban .....	43
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	49
5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.....	50
<b>BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.a	Daftar Realisasi SP2D, SPJ, dan Sisa UYHD Tahun 2018
LAMPIRAN 2	Daftar Rekapitulasi Pendapatan LRA SKPD Tahun 2018
LAMPIRAN 3	LRA, LO, NERACA, dan LPE SKPD Tahun 2018
LAMPIRAN 4	LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2018
LAMPIRAN 5	Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2018 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
LAMPIRAN 6	Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2018 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja.
LAMPIRAN 7	Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 8	Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 9	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dan Penyisihannya Per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 10	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 11	Daftar Beban Bayar Dimuka Per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 12	Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2018
LAMPIRAN 13	Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 14	Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Rumah Dinas Tahun 2018
LAMPIRAN 15	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) beserta Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 16	Daftar Persediaan per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 17	Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 18	Daftar Aset lainnya per 31 Desember 2018 beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 19	Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2018
LAMPIRAN 20	Daftar KIB F. (Konstruksi dalam Pengerjaan)
LAMPIRAN 21	Daftar Belanja Modal Tahun 2018
LAMPIRAN 22	Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2018
LAMPIRAN 23	Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2018
LAMPIRAN 24	Daftar Penghapusan Aset Lainnya SKPD Tahun 2018
LAMPIRAN 25	Register SP2D SKPD Tahun 2018
LAMPIRAN 26.a	Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD-Khusus RSUD dan UPTD Dinas Kesehatan
LAMPIRAN 26.b	Daftar Laporan Operasional BLUD-Khusus RSUD dan UPTD Dinas Kesehatan
LAMPIRAN 27	Penjelasan Perbedaan LRA Dan LO
LAMPIRAN 28	Jurnal Penyesuaian Tahun 2018
LAMPIRAN 29	Lampiran Lainnya:

- Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) bulan Desember 2018
- Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2018
- Bank Statement untuk Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran di Bank per Tanggal 31 Desember 2018
- Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018
- Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018
- Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2018
- Fotocopy bukti setoran sisa UYHD

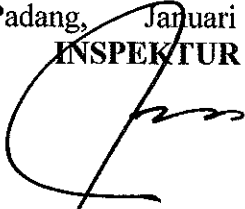
## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

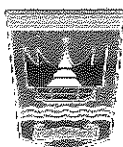
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Padang, Januari 2019

**INSPEKTUR**



**Drs. H. MARDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
19601211 198203 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**  
**NERACA**  
**Per 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

URAIAN	2018	2017 (Audited)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Piutang Pajak	-	-
Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Piutang Retribusi	-	-
Beban Jasa Dibayar Dimuka	55.944.470,00	39.324.362,92
Persediaan	29.062.050,00	46.593.150,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>85.006.520,00</b>	<b>85.917.512,92</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	1.097.970.000,00	1.097.970.000,00
Peralatan dan Mesin	4.440.501.637,00	3.589.355.220,00
Bangunan Gedung	3.419.235.808,00	3.148.066.808,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset tetap lainnya	27.003.328,00	39.965.774,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(3.767.287.029,11)	(3.695.456.060,82)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>5.217.423.743,89</b>	<b>4.179.901.741,18</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset tidak berwujud	134.365.000,00	24.750.000,00
Aset yang tidak bermanfaat	658.315.546,00	-
Akumulasi Amortisasi	(46.673.000,00)	(24.750.000,00)
Akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat	(634.966.600,00)	-
<b>Jumlah Aset lainnya</b>	<b>111.040.946,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.413.471.209,89</b>	<b>4.265.819.254,10</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang perhitungan pihak ketiga	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-
Utang Belanja Pegawai	492.080.254,00	323.779.628,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.350.749,00	11.674.568,00
Utang jangka pendek lainnya	-	-
<b>Jumlah kewajiban jangka pendek</b>	<b>504.431.003,00</b>	<b>335.454.196,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>504.431.003,00</b>	<b>335.454.196,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>	<b>4.909.040.206,89</b>	<b>3.930.365.058,10</b>
<b>Ekuitas</b>		
- Ekuitas	3.937.865.058,10	4.211.658.749,15
- Surplus/Defisit - LO	(18.408.906.135,21)	(16.087.081.986,05)
<b>EKUITAS SAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Perubahan SAL	19.380.081.284,00	15.805.788.295,00
Surplus Defisit - LRA	(19.380.081.284,00)	(15.805.788.295,00)
<b>Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>19.380.081.284,00</b>	<b>15.805.788.295,00</b>
R/K (M) PPKD	-	-
R/K (K) PPKD	19.380.081.284,00	15.805.788.295,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.909.040.206,89</b>	<b>3.930.365.058,10</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5.413.471.209,89</b>	<b>4.265.819.254,10</b>

Padang, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran  
INSPEKTUR



**Drs. H. MARDI, MM**

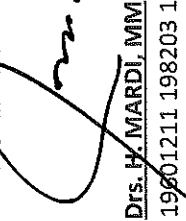
NIP. 19601211 198203 1 007

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018  
(versi PERMENDAGRI 13)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018		Sisa Anggaran		Realisasi 2017	Keterangan
		Rp	%	Rp	%		
<b>PENDAPATAN</b>							
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>							
Pajak Daerah	-	-	-	-	-		
Retribusi Daerah	-	-	-	-	-		
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>							
<b>BELANJA</b>							
Belanja Langsung	7.568.950.000	7.536.035.873	99,57	32.914.127	0,43	7.337.031.838	
Belanja Pegawai	7.568.950.000	7.536.035.873	99,57	32.914.127	0,43	7.337.031.838	
Belanja Tidak Langsung	12.124.851.900	11.844.045.411	97,68	280.806.489	2,32	8.468.756.457	
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-		
Belanja Barang dan Jasa	10.399.133.600	10.199.180.894	98,08	199.952.706	1,92	8.451.460.237	
Belanja Modal	1.725.718.300	1.644.864.517	95,31	80.853.783	4,69	17.296.220	
Jumlah Belanja	19.693.801.900	19.380.081.284	98,41	313.720.616	1,59	15.805.788.295	
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(19.693.801.900)</b>	<b>(19.380.081.284)</b>	<b>98,41</b>	<b>(313.720.616)</b>	<b>1,59</b>	<b>(15.805.788.295)</b>	

Padang, 31 Desember 2018

INSPEKTUR



Drs. H. MARDI, MM

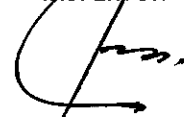
NIP. 19601211 198203 1 007

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018  
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018		Sisa Anggaran (Rp)	Ket
		Rp	%		
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pajak Daerah	-	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	-	-	-	-	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-	
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	7.568.950.000	7.536.035.873	99,57	32.914.127	
Belanja Barang dan Jasa	10.399.133.600	10.199.180.894	98,08	199.952.706	
<b>Jumlah Belanja Operasional</b>	<b>17.968.083.600</b>	<b>17.735.216.767</b>	<b>98,70</b>	<b>232.866.833</b>	
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Tanah	-	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	1.722.718.300	1.641.978.017	95,31	80.740.283	
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.000.000	2.886.500	96,22	113.500	
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.725.718.300</b>	<b>1.644.864.517</b>	<b>95,31</b>	<b>80.853.783</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19.693.801.900</b>	<b>19.380.081.284</b>	<b>98,41</b>	<b>313.720.616</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(19.693.801.900)</b>	<b>(19.380.081.284)</b>	<b>98,41</b>	<b>(313.720.616)</b>	

Padang, 31 Desember 2018

INSPEKTUR



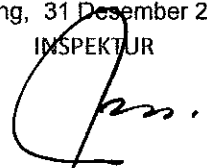
**Drs. H. MARDI, MM**

NIP. 19601211 198203 1 007

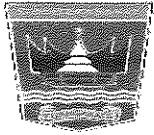
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2018  
(PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013)

Kode rekening	Uraian	2018	2017	KENAIKAN / PENURUNAN	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
8	<b>PENDAPATAN</b>				
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
8.1.1	Pajak Daerah-LO	-	-		
8.1.2	Retribusi Daerah-LO	-	-		
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-		
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	-	-		
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	-	-		
9	<b>BEBAN</b>				
9.1	<b>BEBAN OPERASI</b>				
9.1.1	Beban Pegawai	7.704.336.499,00	7.309.278.872,00	395.057.627,00	
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	10.019.599.067,92	8.339.605.909,08	1.679.993.158,84	
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	684.970.568,29	438.469.284,97	246.501.283,32	
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang			-	
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>18.408.906.135,21</b>	<b>16.087.354.066,05</b>	<b>2.321.552.069,16</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL</b>	<b>(18.408.906.135,21)</b>	<b>(16.087.354.066,05)</b>	<b>(2.321.552.069,16)</b>	

Padang, 31 Desember 2018  
INSPEKTUR



**Drs. H. MARDI, MM**  
NIP. 19601211 198203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2018

NOMOR	URAIAN	2018	2017
1	Ekuitas Awal	3.930.365.058,10	3.930.365.058,10
2	Koreksi Ekuitas	7.500.000,00	-
3	Surplus/Defisit LO	(18.408.906.135,21)	-
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-
5	RK PPKD	19.380.081.284,00	-
6	Ekuitas Akhir	4.909.040.206,89	3.930.365.058,10

Padang, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran  
INSPEKTUR

**Drs. H. MARDI, MM**

NIP. 19601211 198203 1 007

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**INSPEKTORAT PROVINSI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2018**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Informasi Umum**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015. Berdasarkan Rencana Strategik 2017 - 2022, visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah : ***“Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat”***. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah.

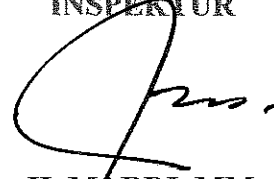
**1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, membawa

Demikian Catatan atas laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

Padang, Januari 2019

**INSPEKTUR**



**H. MARDI, MM**

Pembina Utama Muda

19601211 198203 1 007